

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN
KEUANGAN KOTA GORONTALO**

Oleh:

**SRI RAHAYU HAIDARI
NIM: E1117015**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

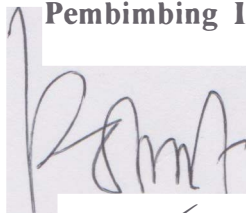
**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA
BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO**

Oleh:
SRI RAHAYU HAIDARI
E1117015

SKRIPSI

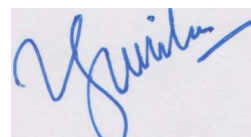
**Telah disetujui dan disiapkan untuk diseminarkan
Gorontalo, Pada Tanggal.....2021**

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si
NIDN: 0914027902

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN: 0924069002

Ace
15/2/2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Oleh
SRI RAHAYU HAIDARI
E11.17.015

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021

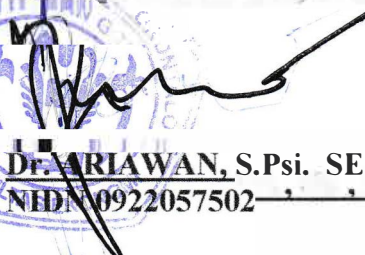
Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri. SE., MM
2. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak
3. Yusrin Abdul, SE., MSA
4. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
5. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. MARIWAN, S.Psi. SE. MM
NIDN 0922057502


RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan



Sri Rahayu Haidari

ABSTRACT

SRI RAHAYU HAIDARI. E1117015. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING AND THE TRANSPARENCY OF BUDGETING TARGET ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY AT THE FINANCIAL DEPARTMENT OF THE CITY OF GORONTALO

The purpose of the research is to gain information of to what extent the effect of performance-based budgeting and the transparency of budgeting target on the performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo either simultaneously or partially. In this research the author chooses the quantitative type of research. Data collection technique is taken by applying primary data consisting of observation, interviews, and questionnaires, and secondary data is obtained through literature studies. The sampling technique implemented is through the application of saturation sampling of population. The analysis method employed is multiple linear regression. The result of the research demonstrates that Performance-based Budgeting (X_1) and the Transparency of Budgeting Target (X_2) simultaneously have positive and significant effect on performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo. The higher the Performance-based Budgeting and the Transparency of Budgeting Target, the higher the effect on performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo. The Performance-based Budgeting (X_1) partially has a positive and significant effect on performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo. It means that the Performance-based Budgeting has an effect on performance accountability. The higher the point of performance-based budgeting, the higher the performance accountability at the Financial Department of the City of Gorontalo. The Transparency of Budgeting Target (X_2) partially has a positive and significant effect on performance accountability at the Financial Department of the City of Gorontalo. In seeing that, the transparency of Budgeting Target has an influence on performance accountability improvement. The more transparent the target of budgeting in planning and implementation, the higher rate of performance accountability at the Financial Department of the City of Gorontalo.

Keywords: Performance-based Budgeting, Transparency of Budgeting Target, Performance Accountability

ABSTRAK

SRI RAHAYU HAIDARI. E1117015. PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, baik secara simultan maupun secara parsial. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang meliputi observasi, wawancara, kuesioner dan data sekunder meliputi pengkajian kepustakaan. Penarikan sampel menggunakan sampel jenuh dari populasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Semakin tinggi nilai faktor anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh di dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Semakin tinggi nilai faktor anggaran berbasis kinerja, semakin tinggi pula nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Sasaran Anggaran berpengaruh di dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan dan dilaksanakan, semakin tinggi pula nilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Kinerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo”**. Dalam penyusunan Skripsi, penulis mengalami berbagai tantangan, keteguhan hati dan limpahan Rahmat serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, juga dorongan dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi, arahan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, demi hasil yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan Ahmad, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1, Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga karya skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dan seluruh pejabat dan staf pegawai dilingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo, yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan penelitian ini, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu/Sdr(i) serta rekan-rekan semua akan mendapat balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi bagi semua pihak dalam memajukan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa. Aamiin.

Gorontalo,

2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Pernyataan	iv
Kata pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.1.1. Anggaran Sektor Publik	8
2.1.2. Anggaran Berbasis Kinerja	11
2.1.2.1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja	11
2.1.2.2. Komponen Anggaran Berbasis Kinerja.....	12
2.1.2.3. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja	13
2.1.3. Kejelasan Sasaran Anggaran.....	15
2.1.4. Akuntabilitas Kinerja.....	16
2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja.....	16
2.1.4.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
2.1.4.3 Prinsip Dan Tahapan Akuntabilitas Kinerja.....	20
2.1.5. Penelitian Terdahulu.....	23
2.1.6. Kerangka Pemikiran	24
2.1.7. Hipotesis Penelitian	25

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	26
3.2. Metode Penelitian	26
3.2.1. Desain Penelitian	26
3.2.2. Operasionalisasi Penelitian.....	26
3.2.3. Populasi dan sampel.....	28
3.2.4. Jenis dan sumber data.....	30
3.2.5. Metode pengumpulan data	31

3.2.6. Pengujian Instrumen penelitian	31
3.2.7. Rencana Penelitian.....	34
3.2.8. Teknik Analisis Data.....	35
3.2.9. Pengujian Hipotesis.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	38
4.2. Pembahasan	57

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64

Daftar Pustaka	65
----------------------	----

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1 Operasioanlisasi Variabel dari penelitian X.....	27
Tabel 3.2 Operasioanlisasi Variabel dari penelitian Y.....	27
Tabel 3.3 Daftar Pilihan kuisisioner.....	28
Tabel 3.4 Populasi.....	29
Tabel 3.5 Rencana Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Skala Penilaian Jawaban Responden	41
Tabel 4.2 Jawaban Responden X1.....	42
Tabel 4.3 Jawaban Responden X2.....	43
Tabel 4.4 Jawaban Responden Y.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas X1.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas X2.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Y.....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.11 Koefesien Diterminasi	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik	53

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	55
Gambar 3.1 Struktur Path analisis	71
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	49
Gambar 4.2 Hasil Uji Path analisis.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 : Kuisisioner.....	70
Lampiran 2 : Tabulasi Data.....	75
Lampiran 3 : Deskriptif Variable.....	81
Lampiran 4: Uji Validitas & Uji Reabilitas	87
Lampiran 5: Analisis Regresi Linier Berganda.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang maju dan sejahtera tidak terlepas dari peran pemerintah didalam mewujudkan tanggung jawabnya didalam melaksanakan setiap program-programnya yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah diberikan mandat oleh rakyat didalam mengelola serta menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah untuk mamajukan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai visi dan misi pemerintah daerah yang direalisasikan melalui program-program prioritas, tentu membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit, dimana arah kebijakan program yang rencana akan dilaksanakan serta sumber anggaran yang digunakan untuk mebiayai program tersebut secara rinci tergambar dalam Anggaran Pendpaatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Penggunaan anggaran dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya oleh masyarakat diharapkan dapat dikelola secara efektif dan efisien serta memenuhi unsur-unsur pengelolaan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, didalam pengelolaan anggaran juga dibutuhkan pengawasan secara internal, sehingga penggunaan dan peruntukannya sesuai dengan apa yang menjadi target capaian yang direncanakan sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah melakukan pengendalian terhadap

penyelenggaraan pemerintahan baik dari aspek skala prioritas program yang dilaksanakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya dan dilaksanakan secara tertib berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi atas penggunaan anggaran juga tidak terlepas dari tingkat capaian hasil program yang diukur melalui *ouput* dan *outcome* yang dihasilkan. Untuk secara keseluruhan, penggunaan anggaran diukur berdasarkan target kinerja yang dicapai oleh pemerintah pada masing lembaga-lembaga dibawahnya. Capain kinerja tersebut dilaksanakan secara transparan dalam memenuhi akuntabilitas kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP, 2010) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan gambaran penjelasan suatu kinerja atau aktivitas dari individu, lembaga atau pimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang disampaikan kepada mereka yang memiliki kepentingan atau berkewenangan dadalam memperoleh infomrasi pertanggungjawaban tersebut.

Untuk terwujudnya akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran. Menurut Bastian (2016:36) anggaran berbasis kinerja merupakan suatu teknik didalam penganggaran disetiap program-program dengan mehubungkan setiap item biaya yang berorientasi pada manfaat yang dihasilkan, dimana manfaat tersebut dijabarkan dalam target kinerja mencakup seperangkat tujuan dan sasaran pada masing-masing unit kerja. Pada penerapannya menurut Mardiasmo (2015)

dilaksanakan sesuai prosedur atau langkah-langkah yang mencakup persiapan dalam penganggaran, ratifikasi, implementasi anggaran, pelaporan hingga pada tahapan evaluasi dalam penganggaran.

Selain penerapan anggaran berbasis kinerja, faktor kejelasan sasaran anggaran juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Menurut Suhartono dan Solichin (2011:24) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Pengukuran kejelasan sasaran anggaran menurut Locke dan Latham (1984) dapat dilihat dari aspek tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi.

Secara empiris telah banyak terbukti bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Menurut Soraya, dkk (2016) bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja, hal ini dikarenakan bahwa sistem penganggaran yang diterapkan telah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan sehingga akuntabilitas dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan Dewiyanti, dkk (2015) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD. Variabel audit intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD. Penelitian Saftiri (2019) juga menunjukkan bahwa kejelasan sasaran

anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.

Badan Keuangan Kota Gorontalo yang sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo No. 49 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Walikota Gorontalo melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan mencakup penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan perkembangannya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Gorontalo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun demikian BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota Gorontalo. Adanya temuan BPK atas permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Kota Gorontalo dipertanyakan. Sebab, temuan-temuan BPK

semestinya dapat dideteksi sejak dini oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo sehingga temuan-temuan tersebut dapat diminimalisir.

Beberapa hasil temuan BPK dalam LKPD Pemerintah Kota Gorontalo sebagian besar berkaitan dengan aspek penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran. Temuan-temuan tersebut diantaranya belum ada monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan sosial, kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja modal, serta penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawabannya, penggunaan tidak sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pertanggungjawaban terlambat dan tidak lengkap.

Selain itu juga, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja barang dan jasa. BPK menjumpai permasalahan antara lain pertanggungjawaban belanja BOS tidak tertib, pengadaan bahan makanan pasien RSUD tidak sesuai ketentuan seperti tanpa pelelangan, harga bahan melebihi harga satuan di kontrak, dan realisasi melebihi nilai kontrak. Permasalahan lainnya menyangkut aspek kepatuhan belanja modal. BPK menjumpai permasalahan antara lain pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Temuan-temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja belum dan kejelasan sasaran anggaran belum secara efektif dilaksanakan, sehingga tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Kota Gorontalo masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali dalam

sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar anggaran berbasis kinerja (X1), secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo ?
2. Seberapa besar kejelasan sasaran anggaran (X2), secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo ?
3. Seberapa besar anggaran berbasis kinerja (X1) dan kejelasan sasaran anggaran (X2), secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (Y) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Bertitik tolak dari masalah yang telah dikemukakan diatas, maka maksud dilaksanakan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar variable anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar anggaran berbasis kinerja (X1), secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kejelasan sasaran anggaran (X2), secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar anggaran berbasis kinerja (X1) dan kejelasan sasaran anggaran (X2), secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam bentuk rekomendasi dari hasil penelitian tentang anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Bagi kalangan akademisi dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian dan pengembangan penelitian lebih lanjut terutama hal-hal yang berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran serta akuntabilitas kinerja.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2013:4) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial yang berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi, meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas serta estimasi mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sedangkan Menurut Halim dan Kusufi (2014:12) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Menurut Mahsun (2014:5) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan di capai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang di nyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik.

Penganggaran dalam sektor publik merupakan aktivitas penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

Menurut Nordiawan (2014:24), anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan dimana harus diinformasikan kepada publik untuk dapat dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Dengan masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, dibutuhkan perencanaan anggaran supaya kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Pengertian APBN dapat dibedakan dalam arti luas yaitu anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan dalam arti sempit, APBN berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki definisi sebagai rencana operasional keuangan pemda, di manasatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan

perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim dan Kusufi, 2014).

Adapun fungsi anggaran sektor publik, antara lain menurut Mardiasmo (2013:6) adalah :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Untuk menghindari adanya pengeluaran terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau penggunaan tidak semestinya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik. Untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran sebagai alat motivasi. Untuk memotivasi agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Avionita (2013:45) penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Variasi dalam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Menurut Halim (2007:177) anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan ke luaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi da lam pencapain hasil dari ke luaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja. Sedangkan menurut Bastian (2016:36) Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, dimana manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada tiap unit kerja.

Mardiasmo (2015:105) mengunkapkan bahwa anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sedangkan menurut Sancoko, dkk (2008:59)

memaparkan bahwa prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.

2.1.2.2 Komponen Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Sancoko, dkk (2008:62) terdapat komponen-komponen yang harus ditetapkan terlebih dahulu didalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, yakni sebagai berikut:

1. Visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.
2. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Sasaran yang menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (*specific, measureable, achieveable, relevant, timely/ SMART*) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan.

4. Program yang merupakan sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran.
5. Kegiatan yang berarti serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.

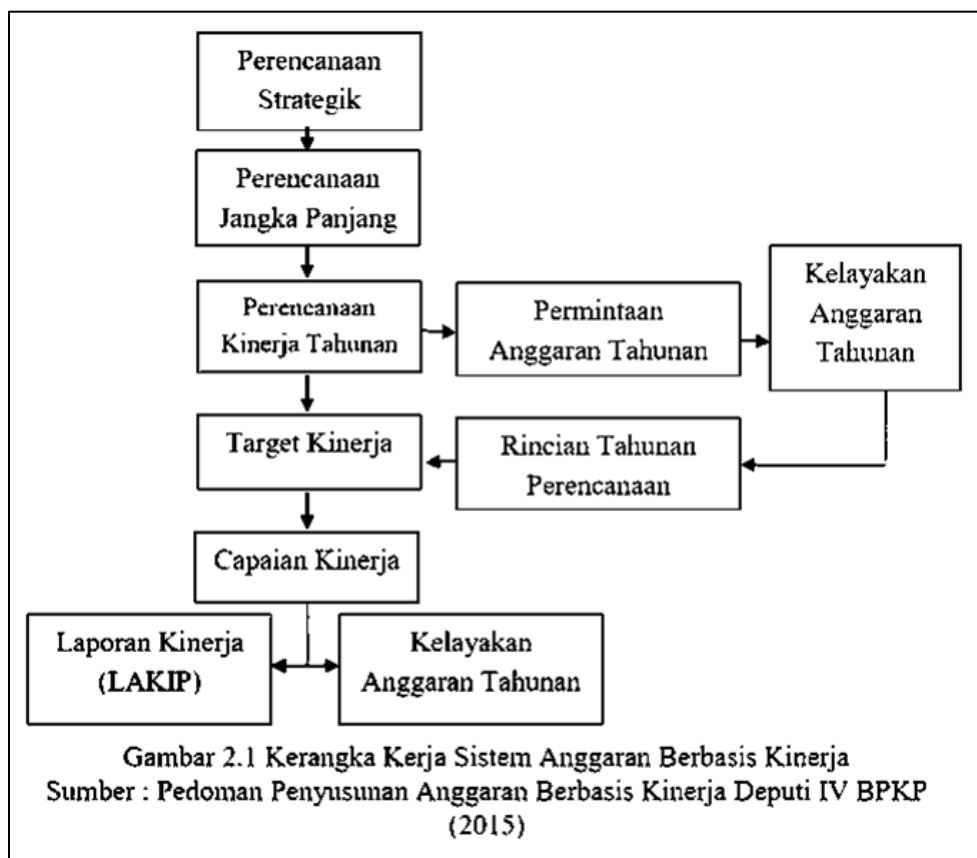
2.1.2.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2015:70) siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas: (a) Tahap persiapan (*preparation*); (b) Tahap ratifikasi (*approval/ratification*); (c) Tahap implementasi (*implementation*); dan (d) Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*).

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budged Preparation*). Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi serta tujuan organisasi. Selain itu, sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budged Ratification*). Melibatkan proses politik yang rumit. Pimpinan dituntut memiliki integritas dan kesiapan mental yang tinggi, dikarenakan pimpinan harus mempunyai kemampuan menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari legislatif.
3. Tahap Implementasi Anggaran (*Budgeting Implementation*). Dalam tahap ini, yang perlu diperhatikan adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan

sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budgeting Reporting and Evaluation*) Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait aspek operasi anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi terkait aspek akuntabilitas, sehingga apabila tahap implementasi sudah didukung dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik maka tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan memenuhi masalah.



2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Supriyono (2001:349) bahwa anggaran adalah gambaran kuantitatif dari tujuan manajemen dan sebagai alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi semua manajer pada unit organisasi di bawahnya, untuk mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi kinerja manajer.

Kejelasan sasaran anggaran menurut Suhartono dan Solichin (2011:24) merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sedangkan menurut Kenis (1979) dalam Putra (2013:6) dijelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Locke dan Lathan (1984) dalam Putra (2013:6) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Selain itu juga, Steers dan Porter (1976) dalam Putra (2013:7) bahwa karakteristik utama dalam menentukan sasaran anggaran yakni sasaran harus spesifik bukan samar-samar; dan sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Putra (2013:7) bahwa pengukuran sasaran anggaran yang efektif diperlukan 7 indikator, yakni:

1. Tujuan, yakni membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, yakni menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, yakni menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, yakni menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, yakni menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, yakni menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, yakni menetapkan kebutuhan koordinasi.

2.1.4 Akuntabilitas Kinerja

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Menurut Kusumastuti (2014:2) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Sedangkan menurut Mahmudi (2013:9) akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Selain itu juga, Lembaga Administrasi Negara/LAN (2003:3) menyebutkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi. Mardiasmo (2005:121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu : 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ledvina V. Carmo (1991) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP, 2010) akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja harus merujuk kepada spektrum yang lebih luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja,

responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban tugas tanggung jawab. Konsep akuntabilitas ini tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, melainkan kepada masyarakat umum atau stakeholders (Moheriono, 2012).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2010:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuandan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.4.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Mangkunegara (2013:56) dijelaskan bahwa penerapan akuntabilitas berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang optimal dan legal dan harus bisa meningkatkan akuntabilitas formal yang ditetapkan organisasi. Dasar dari akuntabilitas pemerintah adalah keyakinan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemerintahan.

Sehingga, publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang direncanakan dan dilakukan pemerintah serta bagaimana kinerja pemerintah untuk mencapainya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003).

Menurut Moheriono (2012:79) terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi oleh akuntabilitas pemerintah untuk memberikan laporan kinerja, yaitu:

1. Memberikan hasil analisis laporan tersebut kepada penerima pertanggungjawaban dari yang menilai.
2. Menerima eksekusi kekuasaan pertanggungjawaban dari yang memberi.
3. Menerima hasil penilaian prestasi kerja dalam bentuk penghargaan atau sanksi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang tersebut mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah selaku pengguna anggaran untuk segera menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tiap tahun. Dalam laporan ini, pemerintah menyajikan dan mengumumkan informasi keuangan yang dapat diketahui oleh masyarakat/publik untuk dilihat dan dievaluasi atas kinerja keuangan yang telah dibuat kepada masyarakat umum.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia sudah diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Negara (LAN) No 589/IX/6/Y/1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan AKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 239/IX/6/8/2003. Dalam tugasnya setiap instansi pemerintah harus menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berdasarkan dari rencana kerja dan kegiatan yang berpedoman dalam rencana strategis berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi instansi.

Selain itu juga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam peraturan ini dijelaskan mengenai SAKIP yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

2.1.4.3 Prinsip Dan Tahapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kegiatan SAKIP (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam prosesnya mencakup:

1. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik,
2. merumuskan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah,
3. merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi,
4. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh,

5. mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah, serta melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi tahap-tahap (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2005) :

1. Perencanaan Strategis.

Meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang mengungkapkan seluruh target kinerja yang akan dicapai dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang bersangkutan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran ini dilakukan menggunakan perbandingan antara realisasi dengan tolak ukur yang ditentukan. Perbandingan tersebut memberikan manfaat pada pengukuran kinerja pada saat realisasi dengan yang direncanakan, tetapi bermanfaat dalam bentuk keseriusan pemerintah dan instansi dalam membuat perencanaan.

3. Pelaporan Kinerja

Dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4. Pemanfaatan Informasi Kinerja

LAKIP diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

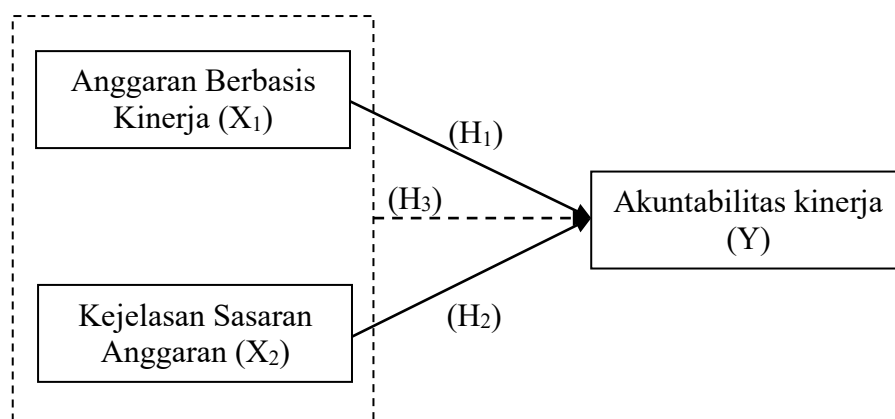
No	Nama	Judul	Naskah
1.	Soraya, dkk (2016)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan dikarenakan bahwa sistem penganggaran pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumsel telah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan sehingga akuntabilitas kinerja di Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumse l dapat meningkat.
2.	Dewiyanti, dkk	Pengaruh	Hasil penelitian menunjukan

	(2015)	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Di Pemerintah Kabupaten Batanghari.	bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern berpengaruh secara simultan pada kualitas LAKIP SKPD. Sedangkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD. Variabel audit intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD.
3.	Saftiri (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi

		Empiris Kabupaten Mamuju Tengah).	pemerintah akan semakin meningkat. Audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik audit kinerja, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.
--	--	---	--

2.1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka model penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.1.7 Hipotesis

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
3. Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan gambaran latar belakang dan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas kinerja, dengan lokasi penelitian pada Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel-variabel seperti yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator dari variabel-variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan instrumen atau pengukuran variabel. Adapun indikator dari variabel-variabel tersebut diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X)	Anggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	1. Persiapan Anggaran 2. Ratifikasi Anggaran 3. Implementasi Anggaran 4. Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Mardiasmo, 2015), (Verasvera 2016)	Ordinal
	Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka Waktu 5. Sasaran Prioritas 6. Tingkat Kesulitan 7. Koordinasi Putra (2013:7)	Ordinal
Akuntabilitas kinerja (Y)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik, 2. merumuskan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi instansi pemerintah, 3. merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi, 4. memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh, 5. mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah, serta melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah. (Perpres No. 29 tahun 2014)	Ordinal

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala *likert*. Teknik skala likert yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai skor pada item jawaban. Pemberian skor untuk setiap jawaban

dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian ini akan mengacu kepada pernyataan Sugiyono (2001:86) dimana jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata. Kuisisioner disusun dengan menyiapkan (lima) pilihan yakni : sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, sangat tidak setuju. Setiap pilihan akan diberikan akan diberikan bobot nilai yang berbeda setiap tampak dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2
Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat setuju/selalu	5
Setuju/sering	4
Kurang setuju/kadang-kadang	3
Tidak setuju/jarang	2
Sangat tiadak setuju/tidak pernah	1

3.2.3 Populasi Dan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan peneliti di analisis dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Sudjana (2004:68), populasi adalah totalitas semua hasil yang mungkin menghitung pengukuran kuantitatif pada karasteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang

menjadi objek penelitian. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo yang berjumlah 77 orang.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekertaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang Pendapatan	1 Orang
4.	Kepala Bidang Anggaran	1 Orang
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 Orang
6.	Kepala Bidang Akuntansi	1 Orang
7.	Kepala Bidang Aset	1 Orang
8.	Kepala Sub Bagian	3 Orang
9.	Kepala Sub Bidang	15 Orang
10.	Jabatan Fungsional lainnya dan Staf Pegawai	52 Orang
Jumlah		77 Orang

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo 2020

3.2.3.2 Sampel

Sugiyono (2010:62) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya secara tepat dalam hal ini tergantung dalam dua hal metode penarikan sampel dan penentuan ukuran sampel. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2017: 124) sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode sampling jenuh dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa seluruh pejabat dan staf pegawai pada Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki pemahaman dan ikut

berhubungan langsung dengan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 Responden.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang merupakan data langsung dari obyek penelitian yaitu Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo, untuk data primer ini dilakukan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemimpin atau staf yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.

3. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan struktur yang diajukan kepada pegawai Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo sejumlah sampel yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder dengan tujuan melengkapi data primer. Data sekunder didapatkan dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori. Bahan-bahan pendukung berasal dari Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi

Universitas Ichsan Gorontalo. Dari kedua sumber data ini maka peneliti akan mengelolah data-data tersebut untuk menarik suatu kesimpulan.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer yang merupakan data langsung dari lokasi penelitian yaitu pada kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo. Adapaun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu teknik ini digunakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pimpinan dan staf yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.
- 3) Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada seluruh karyawan Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo.

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian

3.2.6.1 Uji Validitas Data

Menurut Riduwan (2010:109) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Suatu instrumen yang valid adalah sahian memiliki validitas yang tinggi sebaliknya instrumen yang kurang berarti memiliki validitas rendah.

Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item kuesioner yang valid dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan dengan mencari korelasi setiap item pertanyaan dengan skor total pernyataan untuk hasil jawaban responden yang mempunyai skala pengukuran minimal ordinal setiap pilihan jawaban lebih dari dua pilihan, perhitungan korelasi antara pertanyaan kesatu dengan score total digunakan alat uji korelasi dengan rumus (*pearson product moment*). Menurut Riduwan (2010:110) Rumus *pearson product moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{ (n\sum X^2) - (\sum X^2) \} \{ n\sum Y^2 - (\sum Y^2) \}}}$$

Dimana:

- r = Koefisien Korelasi
- X = Jumlah skor item
- Y = Jumlah skor total (seluruh item)
- n = Jumlah responden

Menurut Sugiyono (2013:178) pengujian validitas setiap item pertanyaan dilakukan dengan menghitung korelasi *Product Moment Pearson* dengan syarat minimum korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas ($r > 0,3$) maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat, sehingga instrument tersebut mempunyai validitas konstruksi yang baik.

3.2.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Gozali (2013) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, metode uji realibilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Menurut Sekaran (2003:96) metode ini sangat cocok

digunakan pada skor berbentuk skala atau skor rentan, dimana uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *koefisien Alfa* (α) dari *Cronbach* dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_b^2} \right) \quad \text{dan} \quad \sigma = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

Dimana :

- r_{11} = reliabilitas instrumen
- k = banyak butir pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir
- σ_b^2 = varian total
- n = jumlah responden
- X = nilai skor yang dipilih

3.2.6.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Metode grafik yang handal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat normal probability plot, sehingga hampir semua aplikasi komputer statistik menyediakan fasilitas ini. Normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (*hypothetical distribution*). Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *Normal P-Plot of Regression Standardized* dari variabel terikat (Gozali, 2013) dimana:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

2) Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks kolerasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks kolerasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (variance inflation factor) dan tolerance-nya. Apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolineritas.

3.2.7 Rencana Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian ini dimulai dari pengusulan judul penelitian pada bulan November 2020 dan ditargetkan penyusunan skripsi rampung pada bulan Maret 2021. Secara keseluruhan, rencana pelaksanaan penelitian ini dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel 3.3
Tabel Rencana Penelitian

Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Pengajuan judul																		
Penyusunan & Bimbingan Proposal																		
Ujain Proposal																		
Revisi dan Pengumpulan Data																		
Penyusunan Skripsi																		
Konsultasi dan Bimbingan Skripsi																		
Persetujuan dan Ujian Skripsi																		

3.2.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2010:277) adalah analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi liner berganda untuk mengukur sejauh mana suatu hubungan dan pengaruh antara variabel, yakni variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah Informasi Akuntansi, Informasi Non Akuntansi dan Integritas. Sedangkan variabel independe adalah Keputusan Pemberian Kredit.

Selain itu juga, pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yaitu SPSS.

Adapun persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

a	= Konstanta
X ₁	= Informasi Akuntansi
X ₂	= Informasi Non Akuntansi
X ₃	= Integritas
Y	= Keputusan Pemberian Kredit
ε	= Epselon

3.2.9 Pengujian Hipotesis

3.2.9.1 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Menentukan kriteria uji hipotesis dapat diukur dengan syarat:

a) Membandingkan t hitung dengan t tabel :

- 1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama - sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama - sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b) Melihat Tingkat Signifikansi

Berdasarkan nilai signifikansi dengan $\alpha = 0,05$:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima

3.2.9.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen.

Hipotesis diterima atau ditolak didasarkan kaidah berikut:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Atau, Jika nilai sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau, Jika nilai sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Badan Keuangan Kota Gorontalo beralamatkan di Jl. Nani Wartabone No. 03 Kota Gorontalo. Badan Keuangna Kota Gorontalo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. Badan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Keuangan Kota Gorontalo sebelumnya bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dirubah menjadi Badan Keuangan Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja. Adapun tugas Badan Keuangan Kota Gorontalo mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Gorontalo dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Gorontalo.

Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

Visi: *“Menjadi Institusi Pengelola Keuangan yang Inovatif”*

Misi:

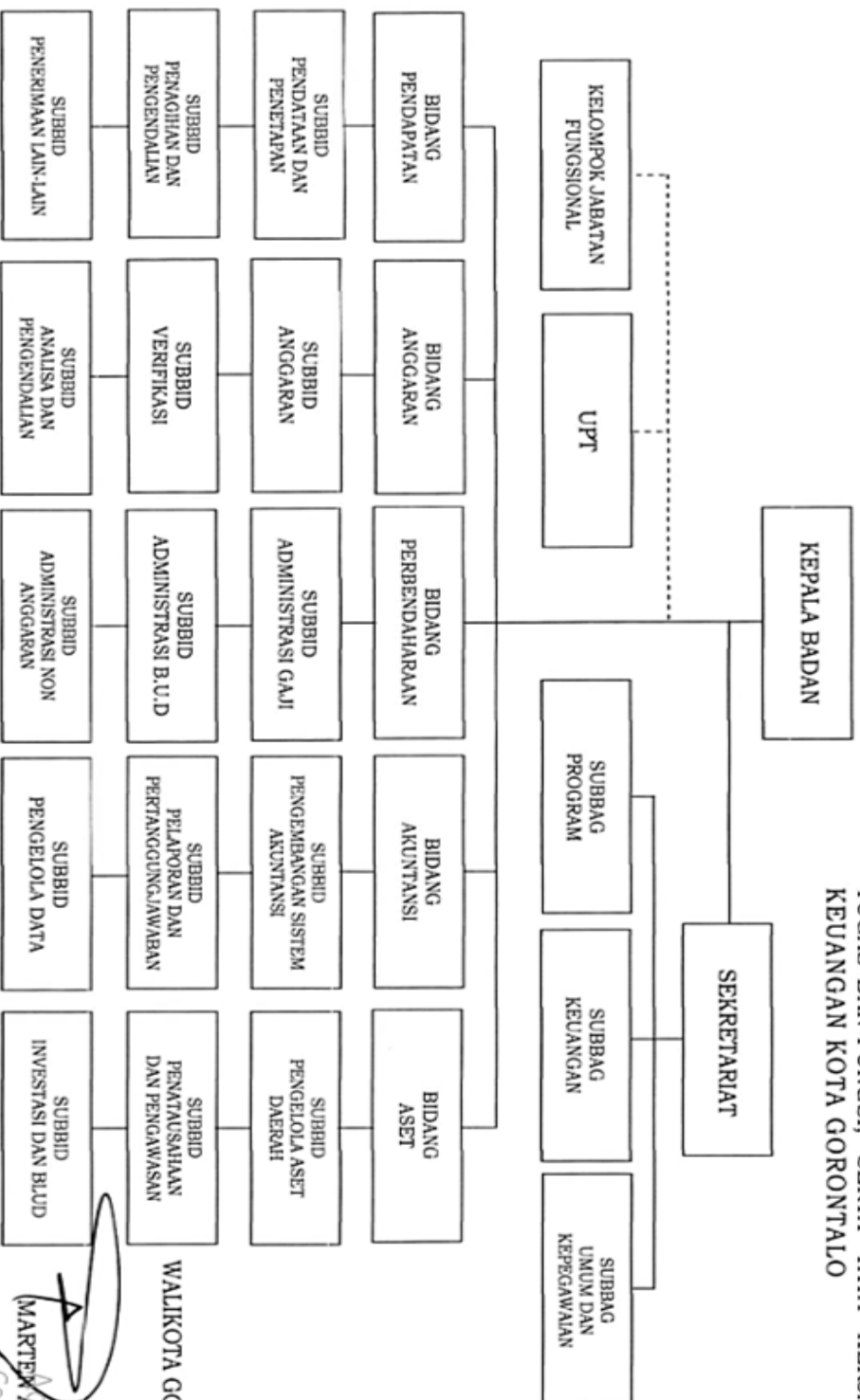
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja baik antar SKPD dan lembaga lain yang saling bekerja sama;
4. Meningkatkan pelayanan Administrasi yang Akuntabel guna mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja;
5. Memantapkan Pelaksanaan Administrasi yang Akuntabel guna mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan;
- d. Bidang Anggaran;
- e. Bidang Perbendaharaan;
- f. Bidang Akuntansi;
- g. Bidang Aset; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR **49** TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
KEUANGAN KOTA GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO,

(Signature)
MARTEN A. TAHA
Go to Settings to ac

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 responden, dimana dalam penyebarannya kuesioner tersebut hanya 53 kuisisioner yang dikembalikan. Sedangkan sisanya sebanyak 24 kuesioner lainnya tidak terisi lengkap, tercecer dan juga responden lainnya sedang tidak berada ditempat pada waktu pengambilan kembali kuisisioner. Kemudian bobot-Bobot butir kuisisioner berdasarkan variabel terlebih dahulu di tabulasi dan dideskripsikan dengan melakukan perhitungan frekwensi dan skor berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. Perhitungan frekwensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih. Sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot option dengan frekwensi. Berikut Proses perhitungannya.

$$\text{Bobot Terendah} \times \text{Item} \times \text{Jumlah Responden} : 1 \times 1 \times 53 = 53$$

$$\text{Bobot Tertinggi} \times \text{Item} \times \text{Jumlah Responden} : 5 \times 1 \times 53 = 265$$

$$\text{Skala Interval} = \frac{265 - 53}{5} = 42$$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala

penelitian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Skala Penilaian Jawaban Responden

No.	Rentang	Kategori
1.	53 – 95	Sangat Rendah
2.	96 – 138	Rendah
3.	139 – 180	Sedang
4.	181 – 223	Tinggi
5.	224 – 265	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Olahan Data 2021

Berikut ini akan disajikan gambaran hasil tabulasi data atau variabel yang menjadi objek penelitian.

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X1)

Hasil Tabulasi data tanggapan responden tentang variabel Anggaran

Berbasis Kinerja dapat dideskriptifkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tanggapan Responden Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

BO-BOT	ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X.1)											
	Item 1.1			Item 1.2			Item 1.3			Item 1.4		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	27	135	50,9%	21	105	39,6%	31	155	58,5%	25	125	47,2%
4	17	68	32,1%	19	76	35,8%	13	52	24,5%	16	64	30,2%
3	8	24	15,1%	11	33	20,8%	9	27	17,0%	12	36	22,6%
2	1	2	1,9%	2	4	3,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	53	229	100,0%	53	218	100,0%	53	234	100,0%	53	225	100,0%
Ket	Sangat Tinggi			Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

BO-BOT	ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X.1)											
	Item 1.5			Item 1.6			Item 1.7			Item 1.8		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	24	120	45,3%	24	120	45,3%	32	160	60,4%	35	175	66,0%
4	14	56	26,4%	18	72	34,0%	13	52	24,5%	11	44	20,8%
3	15	45	28,3%	9	27	17,0%	8	24	15,1%	6	18	11,3%
2	0	0	0,0%	2	4	3,8%	0	0	0,0%	1	2	1,9%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	53	221	100,0%	53	223	100,0%	53	236	100,0%	53	239	100,0%
Ket	Tinggi			Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Sumber : Hasil Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah responden yang menanggapi tentang Anggaran Berbasis Kinerja, berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item 1 termasuk kategori sangat tinggi, item 2 kategori tinggi, item 3 kategori sangat tinggi, item 4 kategori sangat tinggi, item 5 kategori tinggi, item 6 kategori tinggi, item 7 kategori sangat tinggi dan item 8 kategori sangat tinggi.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Hasil Tabulasi data tanggapan responden tentang variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dapat dideskriptifkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Tanggapan Responden Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

BO-BOT	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X.2)											
	Item 2.1			Item 2.2			Item 2.3			Item 2.4		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	21	105	39,6%	21	105	39,6%	28	140	52,8%	24	120	45,3%
4	22	88	41,5%	18	72	34,0%	16	64	30,2%	17	68	32,1%
3	10	30	18,9%	12	36	22,6%	9	27	17,0%	10	30	18,9%
2	0	0	0,0%	2	4	3,8%	0	0	0,0%	2	4	3,8%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	53	223	100,0%	53	217	100,0%	53	231	100,0%	53	222	100,0%
Ket	Tinggi			Tinggi			Sangat Tinggi			Tinggi		

BOBOT	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X2)								
	Item 2.5			Item 2.6			Item 2.7		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	23	115	43,4%	25	125	47,2%	30	150	56,6%
4	18	72	34,0%	17	68	32,1%	12	48	22,6%
3	12	36	22,6%	10	30	18,9%	8	24	15,1%
2	0	0	0,0%	1	2	1,9%	3	6	5,7%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	53	223	100,0%	53	225	100,0%	53	228	100,0%
Ket	Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Sumber : Hasil Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa jumlah responden yang menanggapi tentang item-item pertanyaan pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item 2.1

termasuk kategori tinggi, item 2.2 kategori tinggi, item 2.3 kategori sangat tinggi, item 2.4 kategori tinggi, item 2.5 kategori tinggi, item 2.6 kategori sangat tinggi dan item 2.7 kategori sangat tinggi.

3. Akuntabilitas Kinerja (Y)

Hasil Tabulasi data tanggapan responden tentang variabel akuntabilitas kinerja dapat dideskriptifkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja

BOBOT	AKUNTABILITAS KINERJA (Y)								
	y1			y2			y3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	22	110	41,5%	19	95	35,8%	19	95	35,8%
4	22	88	41,5%	25	100	47,2%	22	88	41,5%
3	9	27	17,0%	7	21	13,2%	12	36	22,6%
2	0	0	0,0%	2	4	3,8%	0	0	0,0%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	53	225	100,0%	53	220	100,0%	53	219	100,0%
Ket	Sangat Tinggi			Tinggi			Tinggi		

BOBOT	AKUNTABILITAS KINERJA (Y)								
	y4			y5			y6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	23	115	43,4%	22	110	41,5%	23	115	43,4%
4	16	64	30,2%	22	88	41,5%	20	80	37,7%
3	13	39	24,5%	9	27	17,0%	10	30	18,9%
2	1	2	1,9%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Σ	53	220	100,0%	53	225	100,0%	53	225	100,0%
Ket	Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Sumber : Hasil Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa jumlah responden yang menanggapi tentang item-item pertanyaan pada variabel Akuntabilitas Kinerja, dengan berdasarkan rentang skala penilaian jawaban responden untuk item Y1 termasuk kategori sangat tinggi, itemY.2 kategori tinggi, itemY.3 kategori tinggi, item Y4 kategori tinggi, item Y5 kategori sangat tinggi dan item Y6 kategori sangat tinggi.

4.1.3 Pengujian Intrumen Penelitian

4.1.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur, dimana kuesioner yang digunakan akan diukur tingkat validitannya terlebih dahulu. Pengujian dilakukan dengan cara mencari angka-angka korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus *Pearson Product Moment*, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus Uji-t dimana distribusi (table t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$) dengan kaidah keputusan jika, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ berarti dinyatakan valid, sebaliknya $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ berarti tidak valid.

Adapun hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap item-item pernyataan dari setiap variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Validitas Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1)

Item	Anggaran Berbasis Kinerja							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
r	0,529	0,465	0,46	0,338	0,610	0,557	0,588	0,295
r²	0,280	0,216	0,212	0,114	0,372	0,310	0,346	0,087
n	53	53	53	53	53	53	53	53
r √n - 2	3,778	3,321	3,285	2,414	4,356	3,978	4,199	2,107
√1 - r²	0,849	0,885	0,888	0,941	0,792	0,831	0,809	0,955
t hitung	4,452	3,751	3,700	2,565	5,498	4,790	5,191	2,205
t tabel	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009
Ket.	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID

Ket:
$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Sumber: Hasil Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan valid karena *r* menunjukkan nilai positif dan *t-hitung* lebih besar dari *t - tabel* ($t_{hitung} > t_{tabel}$), sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reliabilitas.

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Item	Kejelasan Sasaran Anggaran						
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
r	0,368	0,590	0,379	0,545	0,423	0,487	0,502
r²	0,135	0,348	0,144	0,297	0,179	0,237	0,252
n	53	53	53	53	53	53	53
r √n - 2	2,628	4,213	2,707	3,892	3,021	3,478	3,585
√1 - r²	0,930	0,807	0,925	0,838	0,906	0,873	0,865

t hitung	2,826	5,219	2,925	4,642	3,334	3,982	4,145
t tabel	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009
Ket.	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID

Ket:
$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada sub variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) yang terdapat dalam kuesioner dianggap valid karena r menunjukkan nilai positif dan t -hitung lebih besar dari t -tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$), sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reliabilitas.

Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

Item	Akuntabilitas Kinerja					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
r	0,529	0,465	0,46	0,338	0,610	0,557
r²	0,280	0,216	0,212	0,114	0,372	0,310
n	53	53	53	53	53	53
r $\sqrt{n-2}$	3,778	3,321	3,285	2,414	4,356	3,978
$\sqrt{1-r^2}$	0,849	0,885	0,888	0,941	0,792	0,831
t hitung	4,452	3,751	3,700	2,565	5,498	4,790
t tabel	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009	2,009
Keterangan	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID

Ket:
$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada sub variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) yang terdapat dalam kuesioner dianggap valid karena r menunjukkan nilai positif dan t -hitung lebih

besar dari $t - \text{tabel}$ ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$), sehingga pengujian dapat dilanjutkan pada pengujian reliabilitas.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Untuk mengukur keandalan alat ukur diperlukan sebuah pengujian yang disebut uji reliabilitas, dimana pengukuran uji reliabilitas dilakukan dengan cara memberikan skor yang relatif sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Metode uji realibilitas yang sering digunakan adalah *Cronbch's Alpha*. Metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbebtuk skala atau skor rentan. Untuk penentuan apakah instrumen reliable atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sakaran (dalam Dwi Priyanto, 2011:69) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Hasil pengujian reliablilitas terhadap item-item pernyataan dari setiap variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

Variabel/Sub Variabel	Alpaha	Standar	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)	0,692	0,6	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	0,676	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,674	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel di atas, dari keseluruhan nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel tersebut di atas, dari batasan *reliable* dimana reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8

adalah baik, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut dinyatakan reliabel, sebab nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari batasan 0,6.

4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik

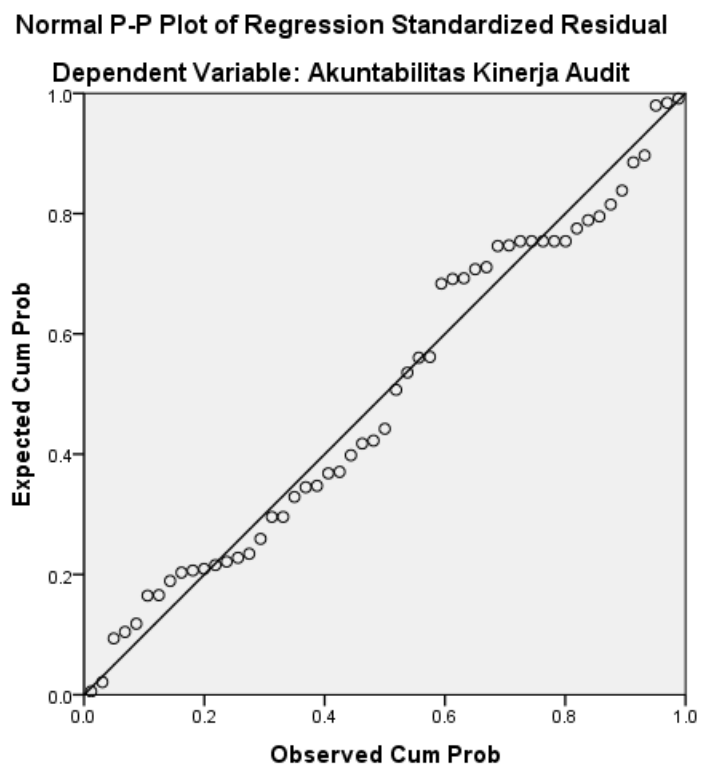
Sebelum model Regresi linear berganda digunakan, model harus memenuhi asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut

a. Uji Normalitas

Metode grafik yang handal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat normal probability plot, sehingga hampir semua aplikasi komputer statistik menyediakan fasilitas ini. Normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (*hypothetical distribution*). Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *Normal P-Plot of Regression Standardized* dari variabel terikat (Gozali, 2010) dimana:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Adapun grafik hasil uji normalitas dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Pengujian Normalitas Data

Gambar 4.1 di atas merupakan hasil uji normalitas data untuk semua dimensi secara simultan terhadap Komitmen. Jika diperhatikan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, yang berarti nilai residual berdistribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Linieritas

Adapun hasil uji liniertias dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas	Between	(Combined)	188.200	11	17.109	5.970	.000
Kinerja *	Groups	Linearity	128.151	1	128.151	44.717	.000
Angg. Berbasis Kinerja		Deviation from Linearity	60.049	10	6.005	2.095	.047
	Within Groups		117.498	41	2.866		
	Total		305.698	52			

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Akuntabilitas	Between	(Combined)	232.773	11	21.161	11.897	.000
Kinerja *	Groups	Linearity	154.998	1	154.998	87.143	.000
Kejelasan Sasaran Angg.		Deviation from Linearity	77.775	10	7.778	4.373	.000
	Within Groups		72.925	41	1.779		
	Total		305.698	52			

Sumber : Data Olahan

Jika memperhatikan Kolom Sig. Pada baris Linearity ditabel ANOVA, jika nilainya $< 0,05$ maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Dan jika nilainya $> 0,05$ maka tidak bersifat linearitas sehingga dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat linearitas. Oleh karena itu, berdasarkan tabel 5.14 di atas menunjukan kolom Sig.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks kolerasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks kolerasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*variance inflation factor*) dan tolerance-nya. Apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

Adapun hasil uji multikolinieritas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Angg. Berbasis Kinerja	.624	1.602
Kejelasan Sasaran Angg.	.624	1.602

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukan masing-masing variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai VIF

berada dibawah 10 dan nilai tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolineritas.

4.1.4 Hasil Analisis Data Statistik

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis. Hipotesis yang nantinya akan diuji untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) baik secara simultan maupun secara parsial.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.578	.562	1.606

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Angg., Angg. Berbasis Kinerja

Hasil uji statistik pada gambar tabel di atas menunjukkan nilai R sebesar 0,761, dimana nilai R digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Sehingga nilai R tersebut menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggara memiliki hubungan yang kuat terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Selain itu juga, nilai *R-Square* atau nilai koefisien determinasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model didalam

menerangkan variasi-variasi dependen. Adapun besarnya nilai *R-Square* yakni 0,578 atau dapat diinterpretasikan bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 57,8%. Dengan kata lain, 57,8% pengaruh yang ada terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, dijelaskan oleh faktor Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran serta masih terdapat sekitar $(100,0\% - 57,8\%) = 42,2\%$ ditentukan oleh faktor-faktor lain dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 4.10
Uji Statistik Variabel

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.967	2.700		1.099	.277
	Angg. Berbasis Kinerja	.261	.090	.338	2.909	.005
	Kejelasan Sasaran Angg.	.442	.102	.505	4.344	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Audit

Berdasarkan hasil pengujian data statistik table 4.10 diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

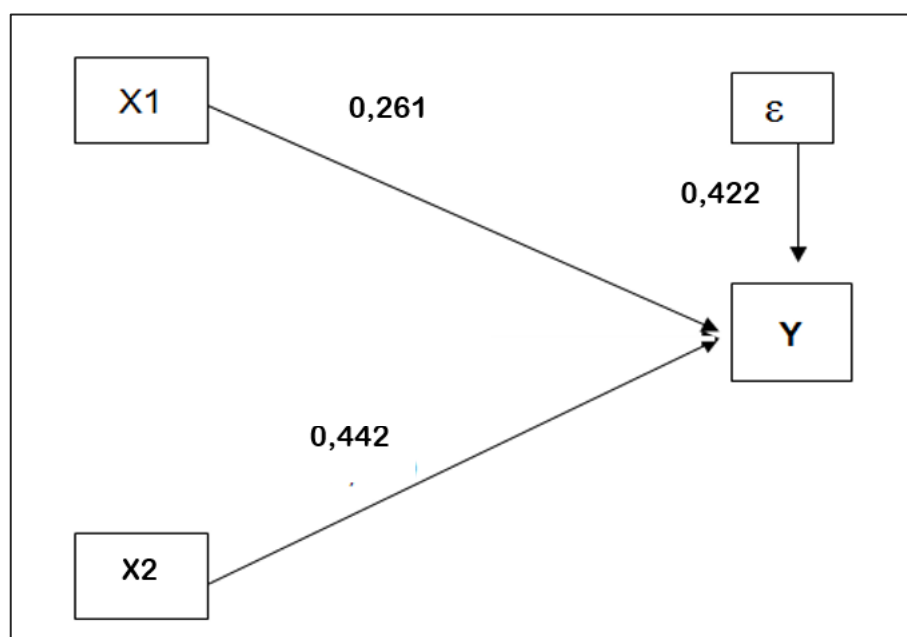
$$Y = 2,967 + 0,261X_1 + 0,442X_2 + 0,422\epsilon$$

Dari persamaan diatas, menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 2,967, dimana jika tidak ada kenaikan dari variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) maka nilai variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar 2,967. Koefisien variabel independen yakni faktor Anggaran Berbasis Kinerja (X_1), bertanda positif ($X_1=0,261$), artinya menandakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) yang diukur terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

memiliki pengaruh yang positif. Besarnya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja yang secara langsung terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,261 atau 26,1%.

Koefisien variabel independen yakni faktor Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2), bertanda positif ($X_2=0,442$), artinya menandakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2), yang diukur terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) memiliki pengaruh yang positif. Besarnya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) yang secara langsung terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,442 atau 44,2%. Sedangkan nilai *epselon* ($\varepsilon = 0,422$) menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang tidak diteliti dan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 42,2%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka model regresi berganda dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2: Model Regresi Berganda

4.1.5 Pengujian Hipotesis

- a. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) Secara Parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil uji t dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) secara parsial (terpisah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan taraf signifikan = $0,005 < \text{sig } 0,05$. Ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara statistik Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) secara parsial (terpisah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jadi, **hipotesis pertama** yang menyatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) Secara Parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, **diterima**.

- b. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) Secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil uji t dapat dilihat pada tingkat kepercayaan sebesar 95% secara statistik menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara parsial (terpisah) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, dengan taraf signifikan = $0,000 < \text{sig } 0,05$. Ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara statistik Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara parsial (terpisah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota

Gorontalo. Jadi, **hipotesis Kedua** yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) yang Secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, **diterima**.

c. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) Secara simultan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil uji pada tabel ANOVA (terlampir) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 34.294 dengan taraf signifikansi adalah 0,000. Berdasarkan uji F tersebut menunjukkan bahwa koefisien variabel menunjukkan angka positif dengan tingkat signifikansi $0,000 < \alpha$ ($\alpha=0,05$), ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara statistik variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan didalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jadi **hipotesis ke tiga** yang menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara bersama-sama dapat meningkatkan Akuntabilitas kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, **diterima**.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)

Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variasi variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara bersama-sama terhadap model secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0,578 atau 57,8%, dengan nilai F_{hitung} sebesar 34.294 dengan taraf signifikansi adalah 0,000. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, secara statistik variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan didalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwasanya secara besarma-sama Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki peran besar didalam meingkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Sebab dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (2003) dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic.

Penelitian ini sejalan dengan teori, dimana perwujudan kewajiban dalam kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas tentu tidak terlepas dari proses pengelolaan anggaran yang didasarkan pada anggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap biaya dalam kegiatan yang dituankan harus memiliki manfaat yang dapat dideskripsikan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam target kinerja pada setiap unit kerja (Bastian, 2016:36). Selain itu juga, kegiatan akuntabilitas kinerja dimulai pada proses penyusunan anggaran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan dan kegiatan evaluasi kinerja manajer sehingga, kejelasan sasaran anggaran ditujukan untuk ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Selain faktor anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran, juga terdapat beberapa faktor lainnya yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, namun demikian hasil penelitian ini selain didukung oleh teori-teori yang ada, juga didukung oleh penelitian empiris oleh Dewiyanti, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran secara simultan terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya jika anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran meningkat, maka akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan.

4.2.2 Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variasi variabel Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap model berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Dimana variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 0,261 atau sebesar 26,1% pada tingkat signifikansi $0,005 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara langsung akan berpengaruh didalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 26,1%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo turut dipengaruhi oleh faktor anggaran berbasis kinerja. Jika system penganggaran dilakukan dengan orientasi kinerja tentu dapat menciptakan efisiensi serta keberhasilan setiap program yang direalisasi. Orientasi kinerja dan keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban anggaran dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas kinerja. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Halim (2007:177) dimana anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan ke luaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan pencapaian hasil dari

ke luaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Soraya, dkk (2016) dimana variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja, dimana semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penelitian Dewiyanti, dkk (2015) juga menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif didalam meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi. Semakin tinggi nilai anagaran berbasis kinerja, maka semakin tinggi pula kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi.

Berdasarkan hasil penelitian, teori-teori dan beberapa penilitian empiris diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitin ini terbukti, dimana anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan didalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, dimana semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang di miliki Badan Keuangan Kota Gorontalo.

4.2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variasi variabel Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial terhadap model berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Dimana variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂) berpegaruh positif dan

signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 0,442 atau sebesar 44,2% pada tingkat signifikansi $0,005 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya Kejelasan Sasaran Anggaran secara langsung akan berpengaruh didalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo sebesar 44,2%.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya jika dibandingkan dengan variabel anggaran berbasis kinerja. Sehingga kejelasan sasaran anggaran memiliki posisi yang paling berpengaruh didalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Kejelasan sasaran anggaran memiliki orientasi tujuan anggaran yang jelas, spesifik, efisien, bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kejelasan sasaran anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas tentang alokasi penggunaan anggaran dan manfaat yang diperoleh secara jelas dan spesifik, sehingga hal ini sangat penting didalam memberikan kontribusi didalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Suhartono dan Solichin (2011:24) dimana kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Teori lainnya yang mendukung hasil penelitian ini adalah menurut Kenis (1979) dalam Putra (2013:6) dimana kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan

pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian empiris sebelumnya oleh Dewiyanti, dkk (2015), dimana secara parsial kejelasan sasaran anggaran mampu memberikan pengaruh didalam meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja secara signifikan. Penelitian Saftiri (2019) juga menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Semakin tinggi nilai faktor anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
2. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh didalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Semakin tinggi nilai faktor anggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh didalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan dan dilaksanakan maka semakin tinggi

pula nilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah

1. Kepada Pimpinan Badan Keuangan Kota Gorontalo disarankan untuk lebih meningkatkan faktor anggaran berbasis kinerja dalam proses penerapan dan pengelolaannya, hasil uji pengaruh secara parsial masih menunjukkan nilai yang relative lebih rendah pengaruhnya jika dibandingkan dengan faktor lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dan kebijakan-kebijakan anggaran yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang berorientasi kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan variabel bebas lain yang diduga memperkuat pengaruh akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Faktor lainnya seperti adanya faktor hasil audit internal, komitmen organisasi, pengendalian akuntansi dan faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Tingginya akuntabilitas kinerja suatu instansi menunjukkan semakin baiknya proses pengelolaan anggaran dalam mencapai target dan tujuan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sesuai dengan visi dan misi instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi ke 4. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Avionita, Venni. 2013. *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah*. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Arens, et al. 2012. *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach, 14th Edition*. England: Pearson Education
- _____. 2008. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. Edisi Dua Belas, Erlangga, Jakarta
- Bastian, I. 2016. *Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewiyanti, Sri. 2017. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Skpd Di Pemerintah Kabupaten Batanghari*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA Vol 2. No. 1.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. & Kusufi, MS. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi. Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurans*. Jakarta. Grasindo
- _____. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung :Alfabeta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Kenis L. 1979. *The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Manajerial Attitudes and Performance*. *Accounting Review*. October, p.707-721
- Kusumastuti, L.P. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- LAN dan BPKP. 2010. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.

- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi. IlmuManajemen YKPN*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- _____. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFEYogyakarta.
- Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Nordiawan, D. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik APIP
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Sancoko dkk. 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sawyer, L. B. 2009. *Internal Auditing. Buku Dua. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat
- Safitri, ASI. 2019. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah)*. Bongaya Journal for Research in Accounting Volume2 Nomor 2. Hal 1-13. e-ISSN: 2615-8868Homepage: <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk. Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung :Sinar. Baru Algensido Offset

- Supriyono, R.A. 2016. *Akuntansi Keperilakuan. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suhartono, E & Solichin, M. 2001. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. 2013. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
- Soraya, G. 2014. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan*. Jurnal, Hal 1-10. STIEMulti Data Palembang. (<http://eprints.mdp.ac.id> > Jurnal). Diakses tanggal 06 Desember 2016
- Tunggal, A. W. 2012. *Intisari Internal Audit*. Jakarta: Rineka

Hal : permohonan kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/ibu/Sdr (i)

Staf pegawai badan keuangan kota Gorontalo

di-

Gorontalo

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI RAHAYU HAIDARI**
 Nim : **E1117015**
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Akuntansi

Saat ini sedang melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul :
Pengaruh Komitmen Profesional Pegawai Terhadap Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Oleh karena itu saya mohon kesediaan bapak/ibu/sdr (i) untuk dapat mengisi / menjawab daftar pertanyaan yang terlampir.

Untuk lebih meyakinkan bapak/ibu/sdr (i) perlu saya informasikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu khususnya ilmu akuntansi dan sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada program strata satu (S1) di universitas ichsan Gorontalo. Semua data dan informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya.

Hormat saya

Sri Rahayu Haidari

A. DATA RESPONDEN DAN PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

I. Berikanlah keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Usia : Tahun
4. Pendidikan :
5. Jabatan :

II. Petunjuk pengisian kuisisioner

Bapak/ibu dipersilahkan memilih salah satu jawaban yang dianggap tepat atau paling sesuai menurut pendapat bapak/ibu dengan melingkari setiap jawaban yang anda pilih.

I. Berilah Jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan memberi tanda kroscek (✓)

A. Anggaran Berbasis Kinerja (X₁)

1. Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras dengan visi misi, menjadi dasar utama pembuatan target dan indikator kinerja pada pelaksanaan aktivitas
a. Selalu dilakukan penyelarasan tujuan dan visi misi
b. Sering dilakukan penyelarasan tujuan dan visi misi
c. Kadang-kadang dilakukan penyelarasan tujuan dan visi misi
d. Jarang dilakukan penyelarasan tujuan dan visi misi
e. Tidak pernah dilakukan penyelarasan tujuan dan visi misi
2. Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki informasi finansial tersedia dengan lengkap untuk digunakan sebagai perencanaan anggaran
a. Selalu memiliki ketersediaan informasi finansial secara lengkap
b. Sering memiliki ketersediaan informasi finansial secara lengkap
c. Kadang-kadang memiliki ketersediaan informasi finansial secara lengkap
d. Jarang memiliki ketersediaan informasi finansial secara lengkap
e. Tidak pernah memiliki ketersediaan informasi finansial secara lengkap
3. Pengesahan anggaran dilakukan karena anggaran tersebut telah sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
a. Selalu disahkan sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
b. Sering disahkan sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
c. Kadang-kadang disahkan sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
d. Jarang disahkan sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
e. Tidak pernah disahkan sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
4. Ketepatan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran
a. Selalu disahkan sesuai dengan rencana implementasi anggaran
b. Sering disahkan sesuai dengan rencana implementasi anggaran
c. Kadang-kadang disahkan dengan rencana implementasi anggaran
d. Jarang disahkan sesuai dengan rencana implementasi anggaran

e. Tidak pernah disahkan sesuai dengan rencana implementasi anggaran
5. Penyusunan anggaran di Badan Keuangan Kota Gorontalo telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan serta realistis serta menggambarkan hasil berdasarkan value for money
a. Selalu selaras penyusunan anggarannya
b. Sering selaras penyusunan anggarannya
c. Kadang-kadang selaras penyusunan anggarannya
d. Jarang selaras penyusunan anggarannya
e. Tidak pernah selaras penyusunan anggarannya
6. Anggaran Badan Keuangan Kota Gorontalo lebih berorientasi kepada pendayagunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan
a. Selalu berorientasi pada pendayagunaan anggaran yang tersedia
b. Sering berorientasi pada pendayagunaan anggaran yang tersedia
c. Kadang-kadang berorientasi pada pendayagunaan anggaran yang tersedia
d. Jarang berorientasi pada pendayagunaan anggaran yang tersedia
e. Tidak pernah berorientasi pada pendayagunaan anggaran yang tersedia
7. Realisasi anggaran telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Kota Gorontalo
a. Selalu direalisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
b. Sering direalisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
c. Kadang-kadang direalisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
d. Jarang direalisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
e. Tidak pernah direalisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
8. Laporan realisasi anggaran telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan Badan Keuangan Kota Gorontalo
a. Selalu memberikan gambaran yang jelas
b. Sering memberikan gambaran yang jelas
c. Kadang-kadang memberikan gambaran yang jelas
d. Jarang memberikan gambaran yang jelas
e. Tidak pernah memberikan gambaran yang jelas

B. Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂)

1. Anggaran disusun secara terperinci dalam mencapai tujuan umum serta tugas-tugas yang harus dikerjakan.
a. Selalu disusun secara terperinci
b. Sering disusun secara terperinci
c. Kadang-kadang disusun secara terperinci
d. Jarang disusun secara terperinci
e. Tidak pernah disusun secara terperinci
2. Anggaran memberi informasi yang cukup dan jelas atas penetapan kinerja yang dapat diukur.
a. Selalu memberi informasi yang cukup dan jelas
b. Sering memberi informasi yang cukup dan jelas
c. Kadang-kadang memberi informasi yang cukup dan jelas
d. Jarang memberi informasi yang cukup dan jelas
e. Tidak pernah memberi informasi yang cukup dan jelas
3. Anggaran disusun berdasarkan standar atau target yang ingin dicapai
a. Selalu disusun berdasarkan standar atau target yang ingin dicapai
b. Sering disusun berdasarkan standar atau target yang ingin dicapai
c. Kadang-kadang disusun berdasarkan standar atau target yang ingin dicapai
d. Jarang disusun berdasarkan standar atau target yang ingin dicapai
e. Tidak pernah disusun berdasarkan standar atau target yang ingin dicapai
4. Penyusunan anggaran didasarkan pada jangka waktu yang ditetapkan, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
a. Selalu disusun didasarkan pada jangka waktu yang ditetapkan
b. Sering disusun didasarkan pada jangka waktu yang ditetapkan
c. Kadang-kadang disusun didasarkan pada jangka waktu yang ditetapkan
d. Jarang disusun didasarkan pada jangka waktu yang ditetapkan
e. Tidak pernah disusun didasarkan pada jangka waktu yang ditetapkan
5. Menetapkan sasaran yang prioritas dalam penyusunan anggaran
a. Selalu menetapkan sasaran yang prioritas
b. Sering menetapkan sasaran yang prioritas
c. Kadang-kadang menetapkan sasaran yang prioritas
d. Jarang menetapkan sasaran yang prioritas

e. Tidak pernah menetapkan sasaran yang prioritas
6. Menetapkan sasaran anggaran berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas
a. Selalu ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas
b. Sering ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas
c. Kadang-kadang ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas
d. Jarang ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas
e. Tidak pernah ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan prioritas
7. Kejelasan sasaran anggaran dapat menetapkan kebutuhan koordinasi dalam melaksanakan tugas
a. Selalu dilakukan
b. Sering dilakukan
c. Kadang-kadang dilakukan
d. Jarang dilakukan
e. Tidak pernah dilakukan

C. Akuntabilitas Kinerja (Y)

1. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik Badan Keuangan Kota Gorontalo
a. Selalu dilakukan
b. Sering dilakukan
c. Kadang-kadang dilakukan
d. Jarang dilakukan
e. Tidak pernah dilakukan
2. Perumusan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi Badan Keuangan Kota Gorontalo
a. Selalu dilakukan
b. Sering dilakukan
c. Kadang-kadang dilakukan
d. Jarang dilakukan
e. Tidak pernah dilakukan
3. Adanya perumusan indikator kinerja Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi

a.	Selalu dilakukan perumusan indicator kinerja
b.	Sering dilakukan perumusan indikator
c.	Kadang-kadang dilakukan perumusan indicator kinerja
d.	Jarang dilakukan perumusan indicator kinerja
e.	Tidak pernah dilakukan perumusan indicator kinerja
4.	Dilaksanakannya pemantauan dan pengamatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh Badan Keuangan Kota Gorontalo
a.	Selalu dilaksanakan pemantauan dan pengamatan
b.	Sering dilaksanakan pemantauan dan pengamatan
c.	Kadang-kadang dilaksanakan pemantauan dan pengamatan
d.	Jarang dilaksanakan pemantauan dan pengamatan
e.	Tidak pernah dilaksanakan pemantauan dan pengamatan
5.	Adanya pengukuran atas pencapaian kinerja Badan Keuangan Kota Gorontalo
a.	Selalu dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja
b.	Sering dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja
c.	Kadang-kadang dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja
d.	Jarang dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja
e.	Tidak pernah dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja
6.	Melakukan evaluasi kinerja Badan Keuangan Kota Gorontalo
a.	Selalu dilakukan evaluasi kinerja
b.	Sering dilakukan evaluasi kinerja
c.	Kadang-kadang dilakukan evaluasi kinerja
d.	Jarang dilakukan evaluasi kinerja
e.	Tidak pernah dilakukan evaluasi kinerja

Resp. (n)	Anggaran Berbasis Kinerja (X1)								
									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	5	3	5	4	4	5	5	5	36
2	5	5	4	5	5	5	5	5	39
3	5	4	5	3	5	5	5	4	36
4	5	4	5	5	5	3	4	3	34
5	4	5	3	4	4	5	3	5	33
6	4	4	5	5	4	5	5	4	36
7	5	5	5	4	5	4	5	5	38
8	3	4	4	3	4	4	4	4	30
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	5	5	5	5	5	5	3	5	38
11	5	5	3	3	5	3	5	5	34
12	3	3	4	5	3	4	4	4	30
13	4	5	5	5	5	5	5	5	39
14	5	5	4	4	5	4	5	5	37
15	4	4	3	4	3	4	4	4	30
16	4	4	5	5	4	5	5	4	36
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	3	3	5	3	3	5	32
19	3	3	5	5	3	5	4	5	33
20	5	3	5	4	5	3	5	3	33
21	5	5	5	5	5	5	5	5	40
22	5	4	3	5	3	5	4	5	34
23	5	4	4	3	5	4	5	5	35
24	5	4	4	3	5	5	5	5	36
25	4	5	5	5	5	5	5	5	39
26	3	2	5	4	3	5	5	5	32
27	5	4	4	4	4	5	5	5	36
28	4	4	4	4	4	4	5	5	34
29	4	3	5	5	3	5	5	5	35
30	5	5	5	5	5	5	5	5	40
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	5	3	3	4	5	3	5	5	33
33	4	4	5	5	3	5	4	5	35
34	3	5	4	5	4	4	4	4	33
35	5	5	4	3	4	4	5	4	34
36	5	3	5	3	3	5	5	5	34
37	3	4	3	4	3	3	3	5	28
38	5	5	5	4	4	5	5	3	36
39	5	4	5	4	3	3	4	5	33

40	4	4	5	4	4	5	5	5	36
41	5	5	5	5	5	4	5	3	37
42	5	3	4	4	3	3	3	5	30
43	2	5	5	3	4	5	3	5	32
44	3	5	5	5	5	2	4	2	31
45	4	3	5	3	3	5	4	3	30
46	4	5	3	5	4	2	4	4	31
47	4	2	5	5	3	4	3	5	31
48	4	3	5	5	5	5	5	5	37
49	4	4	3	5	3	3	5	5	32
50	4	4	5	3	5	4	3	5	33
51	5	3	4	5	3	5	5	3	33
52	3	4	4	4	4	4	4	4	31
53	4	4	5	3	5	4	5	4	34

Resp. (n)	Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)							
								Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	5	4	3	5	5	5	3	30
2	5	5	5	5	5	4	5	34
3	3	4	5	3	5	5	4	29
4	5	4	5	4	3	4	3	28
5	4	5	3	4	4	4	5	29
6	3	4	4	5	5	5	5	31
7	5	5	5	5	5	5	4	34
8	4	5	5	4	3	4	5	30
9	5	5	5	5	5	5	5	35
10	3	3	5	5	5	5	4	30
11	4	5	5	4	5	4	4	31
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	3	5	4	5	4	3	28
14	3	5	4	4	4	5	5	30
15	4	3	4	3	4	3	4	25
16	4	4	4	5	4	4	4	29
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	4	2	5	5	3	4	5	28
19	4	3	5	5	5	5	2	29
20	4	4	3	5	3	3	5	27
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	5	3	4	5	3	5	5	30
23	4	5	5	4	4	5	5	32
24	4	4	5	3	5	4	2	27
25	5	4	5	5	4	5	5	33
26	3	5	3	5	5	5	5	31
27	3	3	4	2	5	3	3	23
28	4	5	4	3	5	5	5	31
29	4	5	4	4	5	5	5	32
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	3	5	4	3	5	5	30
33	5	4	4	5	4	2	5	29
34	5	4	3	5	4	3	5	29
35	5	4	4	3	4	4	5	29
36	5	4	4	3	4	3	5	28
37	4	5	3	4	4	4	5	29
38	3	2	5	4	5	4	5	28
39	5	4	4	4	4	5	5	31

40	4	4	4	4	3	5	3	27
41	4	5	5	5	5	3	5	32
42	5	3	3	3	4	3	4	25
43	5	4	5	5	3	4	2	28
44	3	4	3	3	4	5	3	25
45	5	3	5	5	3	4	4	29
46	4	5	4	4	5	3	5	30
47	3	5	5	3	4	5	5	30
48	4	3	5	5	3	4	4	28
49	4	5	3	5	3	3	5	28
50	3	4	5	2	5	5	4	28
51	5	5	5	3	4	3	3	28
52	4	3	4	4	3	4	4	26
53	4	3	5	4	4	5	3	28

Resp. (n)	Akuntabilitas Kinerja (Y)						
							Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	
1	5	3	3	4	5	5	25
2	5	5	5	4	5	5	29
3	4	4	5	3	4	4	24
4	5	4	3	3	3	5	23
5	5	5	3	4	3	4	24
6	3	3	4	4	4	4	22
7	5	5	5	4	5	5	29
8	4	4	4	4	5	5	26
9	5	5	5	5	5	5	30
10	4	5	4	4	4	4	25
11	3	4	4	3	5	5	24
12	4	5	4	5	5	4	27
13	4	4	5	4	4	4	25
14	4	4	4	3	5	4	24
15	5	4	4	5	4	4	21
16	4	5	4	4	4	5	26
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	3	4	3	4	5	23
19	4	5	3	5	4	5	26
20	3	2	5	5	3	5	23
21	5	5	5	5	5	5	30
22	4	4	3	5	3	4	23
23	5	4	5	3	5	3	25
24	4	3	4	5	3	5	24
25	4	5	5	5	5	4	28
26	3	4	5	3	5	4	24
27	5	4	3	5	4	5	26
28	4	5	3	5	5	5	27
29	4	3	4	2	5	5	23
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30
32	3	5	5	4	4	4	25
33	5	5	4	5	4	3	26
34	4	4	4	3	5	3	23
35	3	5	4	5	5	4	26
36	3	4	5	4	4	4	24
37	4	4	4	5	3	4	24
38	3	4	4	5	5	4	25
39	5	4	3	3	4	5	24

40	4	4	4	4	3	4	23
41	5	5	5	5	5	3	28
42	4	4	3	3	4	3	21
43	5	4	4	5	4	5	27
44	4	4	3	5	4	3	23
45	5	4	4	3	4	3	23
46	5	4	4	3	4	4	24
47	4	5	3	4	4	3	23
48	3	2	5	4	5	4	23
49	5	4	4	4	4	4	25
50	4	4	4	4	3	5	24
51	4	3	5	5	4	5	26
52	5	3	3	3	4	3	21
53	5	4	5	5	3	3	25

Deskriptif Variabel

Frequency Table X1

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.9	1.9	1.9
	3	8	15.1	15.1	17.0
	4	17	32.1	32.1	49.1
	5	27	50.9	50.9	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.8	3.8	3.8
	3	11	20.8	20.8	24.5
	4	19	35.8	35.8	60.4
	5	21	39.6	39.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	17.0	17.0	17.0
	4	13	24.5	24.5	41.5
	5	31	58.5	58.5	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	22.6	22.6	22.6
	4	16	30.2	30.2	52.8
	5	25	47.2	47.2	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	15	28.3	28.3	28.3
	4	14	26.4	26.4	54.7
	5	24	45.3	45.3	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.8	3.8	3.8
	3	9	17.0	17.0	20.8
	4	14	26.4	26.4	47.2
	5	28	52.8	52.8	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	15.1	15.1	15.1
	4	13	24.5	24.5	39.6
	5	32	60.4	60.4	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.9	1.9	1.9
	3	6	11.3	11.3	13.2
	4	11	20.8	20.8	34.0
	5	35	66.0	66.0	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Frequency Table X2

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	10	18.9	18.9	18.9
	4	22	41.5	41.5	60.4
	5	21	39.6	39.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.8	3.8	3.8
	3	12	22.6	22.6	26.4
	4	18	34.0	34.0	60.4
	5	21	39.6	39.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	17.0	17.0	17.0
	4	16	30.2	30.2	47.2
	5	28	52.8	52.8	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.8	3.8	3.8
	3	10	18.9	18.9	22.6
	4	17	32.1	32.1	54.7
	5	24	45.3	45.3	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	22.6	22.6	22.6
	4	18	34.0	34.0	56.6
	5	23	43.4	43.4	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.9	1.9	1.9
	3	10	18.9	18.9	20.8
	4	17	32.1	32.1	52.8
	5	25	47.2	47.2	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	5.7	5.7	5.7
	3	8	15.1	15.1	20.8
	4	12	22.6	22.6	43.4
	5	30	56.6	56.6	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Frequency Table Y

Item1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	17.0	17.0	17.0
	4	22	41.5	41.5	58.5
	5	22	41.5	41.5	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Item2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.8	3.8	3.8
	3	7	13.2	13.2	17.0
	4	25	47.2	47.2	64.2
	5	19	35.8	35.8	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Item3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	22.6	22.6	22.6
	4	22	41.5	41.5	64.2
	5	19	35.8	35.8	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Item4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.9	1.9	1.9
	3	13	24.5	24.5	26.4
	4	16	30.2	30.2	56.6
	5	23	43.4	43.4	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Item5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	17.0	17.0	17.0
	4	22	41.5	41.5	58.5
	5	22	41.5	41.5	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Item6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	10	18.9	18.9	18.9
	4	20	37.7	37.7	56.6
	5	23	43.4	43.4	100.0
	Total	53	100.0	100.0	

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Validitas X1

		Correlations								Angg. Berbasis Kinerja
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
X1.1	Pearson Correlation	1	.167	-.002	-.035	.370**	.059	.394**	.103	.529**
	Sig. (2-tailed)		.231	.990	.805	.006	.674	.004	.462	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.2	Pearson Correlation	.167	1	-.100	.069	.573**	-.042	.038	-.002	.465**
	Sig. (2-tailed)	.231		.475	.622	.000	.763	.788	.991	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.3	Pearson Correlation	-.002	-.100	1	.173	.184	.445**	.235	-.135	.460**
	Sig. (2-tailed)	.990	.475		.214	.187	.001	.091	.333	.001
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.4	Pearson Correlation	-.035	.069	.173	1	-.062	.116	.099	-.050	.338*
	Sig. (2-tailed)	.805	.622	.214		.659	.407	.480	.723	.013
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.5	Pearson Correlation	.370**	.573**	.184	-.062	1	-.040	.300*	-.017	.610**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.187	.659		.778	.029	.903	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.6	Pearson Correlation	.059	-.042	.445**	.116	-.040	1	.296*	.290*	.557**
	Sig. (2-tailed)	.674	.763	.001	.407	.778		.031	.035	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.7	Pearson Correlation	.394**	.038	.235	.099	.300*	.296*	1	-.041	.588**
	Sig. (2-tailed)	.004	.788	.091	.480	.029	.031		.773	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
X1.8	Pearson Correlation	.103	-.002	-.135	-.050	-.017	.290*	-.041	1	.295*
	Sig. (2-tailed)	.462	.991	.333	.723	.903	.035	.773		.032
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Angg. Berbasis Kinerja	Pearson Correlation	.529**	.465**	.460**	.338*	.610**	.557**	.588**	.295*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.013	.000	.000	.000	.032	
	N	53	53	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability X1

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.692	9

Validitas X2

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Kejelasan Sasaran Angg.
X2.1	Pearson Correlation	1	.116	.104	.351**	-.205	-.147	.074	.368**
	Sig. (2-tailed)		.408	.459	.010	.141	.295	.597	.007
	N	53	53	53	53	53	53	53	53
X2.2	Pearson Correlation	.116	1	-.080	.076	.301*	.125	.339*	.590**
	Sig. (2-tailed)	.408		.570	.590	.028	.371	.013	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53
X2.3	Pearson Correlation	.104	-.080	1	.069	.161	.284*	-.155	.379**
	Sig. (2-tailed)	.459	.570		.621	.250	.039	.267	.005
	N	53	53	53	53	53	53	53	53
X2.4	Pearson Correlation	.351**	.076	.069	1	-.085	.120	.234	.545**
	Sig. (2-tailed)	.010	.590	.621		.546	.392	.091	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53
X2.5	Pearson Correlation	-.205	.301*	.161	-.085	1	.243	.018	.423**
	Sig. (2-tailed)	.141	.028	.250	.546		.080	.900	.002
	N	53	53	53	53	53	53	53	53
X2.6	Pearson Correlation	-.147	.125	.284*	.120	.243	1	.002	.487**
	Sig. (2-tailed)	.295	.371	.039	.392	.080		.989	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53

X2.7	Pearson Correlation	.074	.339*	-.155	.234	.018	.002	1	.502**
	Sig. (2-tailed)	.597	.013	.267	.091	.900	.989		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53	53
Kejelasan Sasaran Angg.	Pearson Correlation	.368**	.590**	.379**	.545**	.423**	.487**	.502**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.005	.000	.002	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability X2

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.676	8

Validitas Y

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Akuntabilitas Kinerja Audit
Item1	Pearson Correlation	1	.299*	-.094	.062	-.007	.028	.358**
	Sig. (2-tailed)		.029	.503	.659	.962	.841	.008
	N	53	53	53	53	53	53	53
Item2	Pearson Correlation	.299*	1	.062	.303*	.266	-.031	.623**
	Sig. (2-tailed)	.029		.660	.028	.054	.827	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53

Item3	Pearson Correlation	-.094	.062	1	.145	.321*	.076	.485**
	Sig. (2-tailed)	.503	.660		.301	.019	.587	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Item4	Pearson Correlation	.062	.303*	.145	1	-.060	.148	.509**
	Sig. (2-tailed)	.659	.028	.301		.671	.290	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Item5	Pearson Correlation	-.007	.266	.321*	-.060	1	.098	.510**
	Sig. (2-tailed)	.962	.054	.019	.671		.487	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Item6	Pearson Correlation	.028	-.031	.076	.148	.098	1	.430**
	Sig. (2-tailed)	.841	.827	.587	.290	.487		.001
	N	53	53	53	53	53	53	53
Akuntabilitas Kinerja	Pearson Correlation	.358**	.623**	.485**	.509**	.510**	.430**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	53	53	53	53	53	53	53

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.674	7

ANALISIS DATA

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kejelasan Sasaran Angg., Angg. Berbasis Kinerja ^b		Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.578	.562	1.606

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Angg., Angg. Berbasis

Kinerja

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.806	2	88.403	34.294	.000 ^b
	Residual	128.892	50	2.578		
	Total	305.698	52			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Angg., Angg. Berbasis Kinerja

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.967	2.700		1.099	.277
	Angg. Berbasis Kinerja	.261	.090	.338	2.909	.005
	Kejelasan Sasaran Angg.	.442	.102	.505	4.344	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja



LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2926/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :


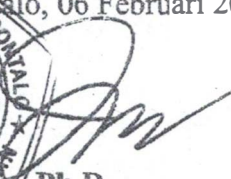
Nama	Zulham, Ph.D
NIDN	0911108104
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada

Nama Mahasiswa	Sri Rahayu Haidari
NIM	E1117015
Fakultas	Fakultas Ekonomi
Program Studi	Akuntansi
Lokasi Penelitian	BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Kota Gorontalo, 06 Februari 2021



Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO

BADAN KEUANGAN

Jln. Nani Wartabone No.06 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/ B.KEU/168 /2021



Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa

Nama : SRI RAHAYU HAIDARI
N I M : E1117015
Program Studi : SI Akuntansi
Fakultas : Universitas Ichsan Gorontalo

Adalah benar-benar telah mengadakan penelitian dan memperoleh data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, berupa Sejarah Singkat Berdirinya Badan keuangan, Visi Misi, bagan Struktur Organisasi digunakan untuk kelengkapan Penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo”**. adapun data yang benar-benar real di dalam kegiatan Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 05 Februari 2021


Kepala BADAN KEUANGAN
KOTA GORONTALO

NURYANTO, Ak.M.Ec.Dev.CA
Pembina Utama Muda
Nip. 19680706 198903 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0011/UNISAN-G/S-BP/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SRI RAHAYU HAIDARI
NIM : E1117015
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Februari 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

E1117015

SRI RAHAYU HAIDARI

Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unej.ac.id	9%
	INTERNET	
2	Gyeongsang National University on 2020-07-22	2%
	SUBMITTED WORKS	
3	www.scribd.com	2%
	INTERNET	
4	jurnal.unpand.ac.id	1%
	INTERNET	
5	positori.uin-alauddin.ac.id	1%
	INTERNET	
6	repository.unpas.ac.id	1%
	INTERNET	
7	media.neliti.com	1%
	INTERNET	
8	Yusrin Abdul, Jullie J Sondakh, Jantje Tinangon. "Pengaruh Faktor-Faktor Individual Terhadap Perilaku Etis Auditor Pada Inspektorat Pro...	1%
	CROSSREF	
9	sipeg.unj.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	pt.scribd.com	<1%
	INTERNET	
11	ojs.stiem-bongaya.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	123dok.com	<1%
	INTERNET	
13	id.scribd.com	<1%
	INTERNET	
14	es.scribd.com	<1%
	INTERNET	
15	docplayer.info	<1%
	INTERNET	
16	eprints.ung.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	id.123dok.com	INTERNET	<1%
18	bpkkdbojonegoro.com	INTERNET	<1%
19	jdih-barutkab.org	INTERNET	<1%
20	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%
21	a-research.upi.edu	INTERNET	<1%
22	e-journal.uajy.ac.id	INTERNET	<1%
23	edoc.site	INTERNET	<1%
24	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
25	docobook.com	INTERNET	<1%
26	digilib.esaunggul.ac.id	INTERNET	<1%
27	thesis.binus.ac.id	INTERNET	<1%
28	selydwiputrijayanti-eloise.blogspot.com	INTERNET	<1%
29	Sriwijaya University on 2019-11-06	SUBMITTED WORKS	<1%
30	Alma Meita Makausi, Harijanto Sabijono, Sherly Pinatik. "KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PE...	CROSSREF	<1%
31	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
32	Universitas Diponegoro on 2017-03-02	SUBMITTED WORKS	<1%
33	engkoskosasih.wordpress.com	INTERNET	<1%
34	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
35	positori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
36	repository.library.uksw.edu	INTERNET	<1%
37	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
38	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
39	jurnal.umrah.ac.id	INTERNET	<1%
40	eprints.radenfatah.ac.id	INTERNET	<1%

41

eprints.umm.ac.id
INTERNET

<1%

42

text-id.123dok.com
INTERNET

<1%

43

www.slideshare.net
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SRI RAHAYU HAIDARI, Lahir di Desa Bonepantai pada Tanggal 15 desember 2000. Anak pertama atau dapat dikatakan penulis adalah anak tunggal dari “ **Bapak Ismail Haidari dan ibunda Linda Moi**”. Saat ini peneliti berdomisili di Dusun IV Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Penulis pertama kali menempuh jalur Pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Sekolah Dasar Negeri 1 Pantungo pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Telaga dan selesai pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Telaga Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis mendaftarkan diri melanjutkan Pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo dengan Nomor Induk Mahasiswa E1117015 dan alhamdulillah selesai pada tahun 2021.

Dengan ketentuan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan karya ilmiah ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

ABSTRACT

SRI RAHAYU HAIDARI. E1117015. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING AND THE TRANSPARENCY OF BUDGETING TARGET ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY AT THE FINANCIAL DEPARTMENT OF THE CITY OF GORONTALO

The purpose of the research is to gain information of to what extent the effect of performance-based budgeting and the transparency of budgeting target on the performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo either simultaneously or partially. In this research the author chooses the quantitative type of research. Data collection technique is taken by applying primary data consisting of observation, interviews, and questionnaires, and secondary data is obtained through literature studies. The sampling technique implemented is through the application of saturation sampling of population. The analysis method employed is multiple linear regression. The result of the research demonstrates that Performance-based Budgeting (X_1) and the Transparency of Budgeting Target (X_2) simultaneously have positive and significant effect on performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo. The higher the Performance-based Budgeting and the Transparency of Budgeting Target, the higher the effect on performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo. The Performance-based Budgeting (X_1) partially has a positive and significant effect on performance accountability at the financial department of the city of Gorontalo. It means that the Performance-based Budgeting has an effect on performance accountability. The higher the point of performance-based budgeting, the higher the performance accountability at the Financial Department of the City of Gorontalo. The Transparency of Budgeting Target (X_2) partially has a positive and significant effect on performance accountability at the Financial Department of the City of Gorontalo. In seeing that, the transparency of Budgeting Target has an influence on performance accountability improvement. The more transparent the target of budgeting in planning and implementation, the higher rate of performance accountability at the Financial Department of the City of Gorontalo.

Keywords: Perfomance-based Budgeting, Transparency of Budgeting Target, Performance Accountability



ABSTRAK

SRI RAHAYU HAIDARI. E1117015. PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, baik secara simultan maupun secara parsial. Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang meliputi observasi, wawancara, kuesioner dan data sekunder meliputi pengkajian kepustakaan. Penarikan sampel menggunakan sampel jenuh dari populasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Semakin tinggi nilai faktor anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh di dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Semakin tinggi nilai faktor anggaran berbasis kinerja, semakin tinggi pula nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Sasaran Anggaran berpengaruh di dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan dan dilaksanakan, semakin tinggi pula nilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Kinerja

